



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA – P) TAHUN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : B - 660 / 117 /SK/DLH-I/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA - PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya di Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan proses kelanjutan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Bahwa untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi dan menyesuaikan dengan berlakunya peraturan yang baru perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah TK. II dan kota praja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 37, tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Perubahan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang merupakan pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini;

Sekayu, 02 Juni 2025

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



OKTARIZAL, S.E
PEMBINA TK. I, Gol. IV/b
NIP. 19771029 200212 1 007

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB, MUBA
NOMOR : B-660/ 117 /SK/DLH-I/2025
TANGGAL : 02 JUNI 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

JABATAN DALAM TIM

NAMA JABATAN

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MUBA

KETUA : SEKRETARIS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MUBA

ANGGOTA : 1. KABID WASDAL, KONSERVASI DAN KEHUTANAN
2. KABID PENGKAJIAN DAN DAMPAK TATA LINGKUNGAN
3. KABID RTH, PERTAMANAN DAN LAMPU/ LAMPU TAMAN
4. KABID PERSAMPAHAN DAN TPA
5. JF. PERENCANA AHLI MUDA
6. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGEWAIAN
7. JF. PENGAWAS AHLI MUDA
8. JF. PENGENDALI AHLI MUDA
9. JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Sekayu, 02 Juni 2025

**PIt KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



OKTARIZAL, S.E
PEMBINA TK. I, Gol. IV/b
NIP. 19771029 200212 1 007



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : B - 660 / 130 /SK/DLH-II/2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA - PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang :

- a. Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya di Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan proses kelanjutan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Bahwa untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi dan menyesuaikan dengan berlakunya peraturan yang baru perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah TK. II dan kota praja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 37, tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Perubahan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang merupakan pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini;

Sekayu, 25 Juni 2025

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



OKTARIZAL, S.E
PEMBINA TK. I, Gol. IV/b
NIP. 19771029 200212 1 007

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Diharapkan nantinya Perubahan RENJA 2025 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Sekayu, 25 Juni 2025

**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**
OKTARIZAL, S.E
PEMBINA TK. I, Gol. IV/b
NIP. 19771029 200212 1 00

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra OPD	8
2.2 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	22
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

- TABEL 2.1. REKAPITULASI PROGRAM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**
- TABEL 2.2. RUMUSAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

1.1 Latar Belakang

- Pengertian Rencana Kerja (Renja PD)

Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih luas.

Secara lebih rinci, Renja PD memuat:

- Visi dan Misi Perangkat Daerah: Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh PD dan cara-cara untuk mencapainya.
- Tujuan dan Sasaran: Target yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam satu tahun.
- Program dan Kegiatan: Rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan akan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, kebutuhan dana, dan lokasi pelaksanaan.
- Kelompok Sasaran: Pihak-pihak yang akan menerima manfaat atau dampak dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- Fungsi dan Tujuan Rencana Kerja (Renja PD)

Renja PD memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting, antara lain:

- Sebagai Pedoman Pelaksanaan: Menjadi acuan bagi setiap PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran.
- Alat Akuntabilitas: Memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk mengawasi kinerja PD dan memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar dilaksanakan.

- Dasar Penganggaran: Menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian belanja Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Sinkronisasi: Memastikan bahwa program dan kegiatan antar-Perangkat Daerah selaras dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
- Evaluasi Kinerja: Digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah pada akhir tahun anggaran.

- **Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja PD)**

Penyusunan Renja PD umumnya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan: Perangkat Daerah mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
2. Perumusan Rancangan Awal: Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD berdasarkan RPJMD, RKPD, dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
3. Forum Konsultasi Publik: Rancangan Renja PD dipresentasikan dan dibahas dalam forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
4. Verifikasi dan Penyelarasan: Rancangan Renja PD diverifikasi dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta mendapatkan persetujuan dari pimpinan daerah.
5. Penetapan: Renja PD ditetapkan secara resmi oleh pimpinan daerah.

Renja PD merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya daerah digunakan secara efektif dan efisien demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

- **Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana fungsi Renja PD melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang

tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

- **Keterkaitan Renja PD dengan Renstra PD.**

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra perangkat daerah yaitu Renja merupakan Penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang disinkronisasi dengan RKPD. Renstra memuat tujuan selama 5 Tahun yang dituangkan dalam Renja yang memuat tujuan 1 Tahun.

- **Keterkaitan Renja PD dengan Renja Provinsi**

Renja PD mendukung kebijakan Renja Provinsi, kebijakan yang ditetapkan Provinsi akan diikuti oleh Kabupaten. Sehingga terciptanya strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Lingkungan Hidup.

- **Keterkaitan Renja PD dengan Kementerian/Lembaga**

Renja PD mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup, kebijakan yang ditetapkan kementerian lingkungan Hidup akan diikuti Kabupaten. Sehingga terciptanya sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

- **Tindak Lanjut dengan Proses Penyusunan RAPBD**

Pada Tahun 2025 ini merupakan tahun ke 3 pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026. Mengingat arti strategis arti dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan ditetapkan. Adapun tahapan proses pengusulan APBD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebagai berikut :

1. Musrenbang Kecamatan
2. Reses DPRD
3. Rancangan Renja PD
4. Forum PD
5. Musrenbang Kabupaten
6. Rancangan RKPD (Proses Bappeda)
7. RKPD (Proses Bappeda)
8. Penyampaian KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD dan disepakati (Kepala Daerah dan DPRD)

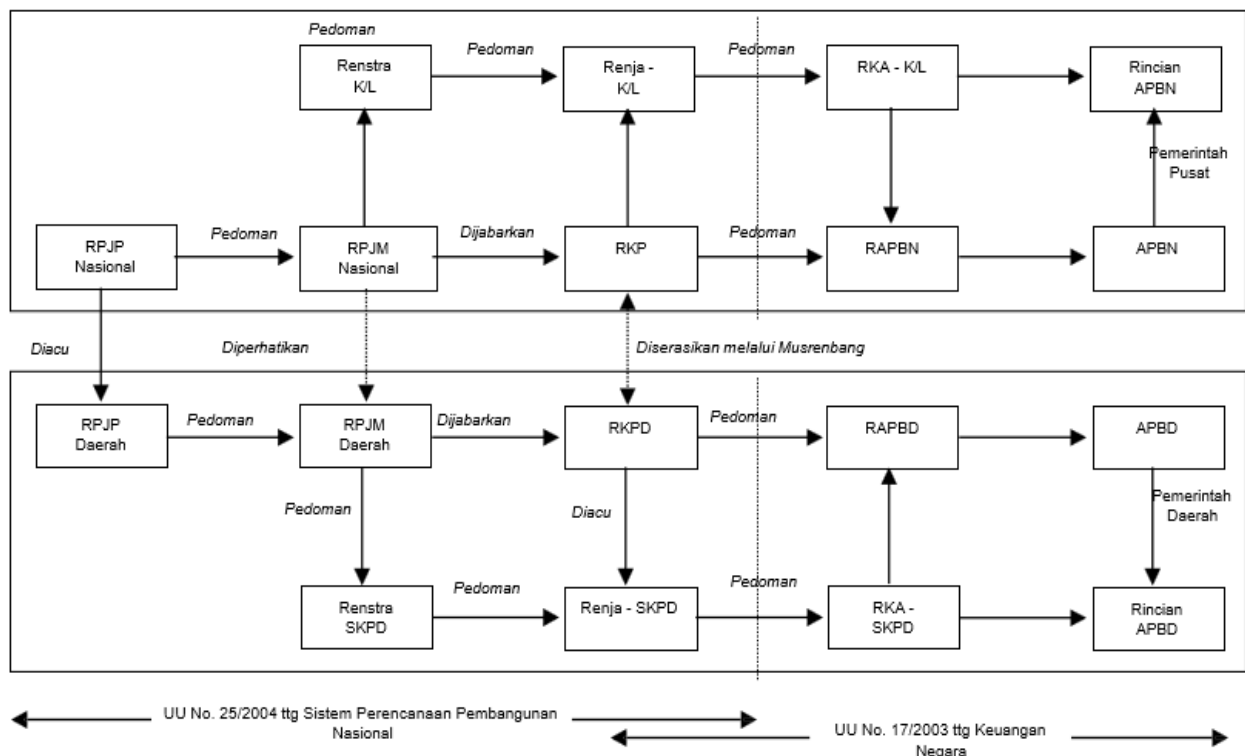
9. Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan Hasil Evaluasi.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Tahun berkenaan dan Renstra PD.
2. Program dan Renja harus sesuai dengan program prioritas daerah pada Tahun berkenaan.
3. Rencana Program dan kegiatan yang baru dalam renja PD Forum musrembang dan kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dapat diusulkan melalui musrembang dan reses DPRD dan usulan dari Bidang-bidang di Dinas Lingkungan Hidup yang telah dimuat dalam RKPD, dilanjutkan menjadi RAPBD dan disahkan menjadi program dan kegiatan APBD.

Gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen Perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1



- Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dalam kaitan dengan **sistem keuangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran Renstra PD setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah satu tahun ke depan. Dengan demikian Perangkat Daerah dapat menentukan besaran anggaran yang diperlukan dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan secara bertahap akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025; diubah menjadi Perda No 8 tahun 2024 tentang RPJPD

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
20. Perbup 55 Tahun 2017 tentang perubahan perbub nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan organisasi uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
22. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.2.4./069/ BAPPEDA/2025 Tahun 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) sebagai Tindak Lanjut terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Perubahan Program dan Kegiatan. Sedangkan tujuannya adalah :

Tujuan evaluasi hasil Renja PD adalah untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja OPD

Bab IV Penutup

Bab ini memuat Hal-Hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- **Menentukan apa yang akan dievaluasi.** Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi key-success factors-nya.
- **Merancang (desain) kegiatan evaluasi.** Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- **Pengumpulan data.** Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- **Pengolahan dan analisis data.** Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- **Pelaporan hasil evaluasi.** Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin didukung 8 Program, 16 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan dengan rincian realisasi sebagaimana terlampir pada Tabel. 2.1 :

• **Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja - PD) sampai dengan Triwulan II (Januari – Juni 2025)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.**

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI BULAN MEI			LOKASI
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN		
		(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
Dinas Lingkungan Hidup	47.827.958.990,00	34,78	15.331.879.578,00	32,06	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.998.506.938,00	41,65	12.798.859.779,00	41,29	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.682.762,00	22,02	9.425.000,00	14,8	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.494.000,00	30	4.446.000,00	19,77	Kecamatan Sekayu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.688.762,00	65	4.979.000,00	57,3	Kecamatan Sekayu
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	32.500.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.168.825.624,00	41,67	3.369.890.165,00	33,14	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.168.825.624,00	41,67	3.369.890.165,00	33,14	Kecamatan Sekayu
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	99.116.950,00	50	49.199.700,00	49,64	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	99.116.950,00	50	49.199.700,00	49,64	Kecamatan Sekayu

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.642.000,00	20	11.196.600,00	12,35	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.642.000,00	20	11.196.600,00	12,35	Kecamatan Sekayu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	929.292.574,00	48,63	435.560.818,00	46,87	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.873,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	494.585.900,00	75,75	374.650.000,00	75,75	Kecamatan Sekayu
<i>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>119.935.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Kecamatan Sekayu</i>
<i>2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Peralatan Perlengkapan Kantor</i>	<i>374.650.000,00</i>	<i>100</i>	<i>374.650.000,00</i>	<i>100</i>	<i>Kecamatan Sekayu</i>
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.272,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.972,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.716.561,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0	0	0	Kecamatan Sekayu
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	0	0	0	Kecamatan Sekayu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.999.996,00	65	60.910.818,00	60,91	Kecamatan Sekayu
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	0	0	0	
Pengadaan Mebel	60.000.000,00	0	0	0	Kecamatan Sekayu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.885.605.163,00	41,67	8.663.239.426,00	45,87	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	440.067.252,00	41,67	117.143.026,00	26,62	Kecamatan Sekayu

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.445.537.911,00	41,67	8.546.096.400,00	46,33	Kecamatan Sekayu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.341.865,00	38,67	260.348.070,00	37,12	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.240.000,00	15	28.599.905,00	10,86	Kecamatan Sekayu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.054.559,00	48,42	128.820.559,00	48,42	Kecamatan Sekayu
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.234.000,00	0	0	0	Kecamatan Sekayu
2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	128.820.559,00	100	128.820.559,00	100	Kecamatan Sekayu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.047.306,00	59,83	102.927.606,00	59,83	Kecamatan Sekayu
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.119.700,00	0	0	0	Kecamatan Sekayu
2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	102.927.606,00	100	102.927.606,00	100	Kecamatan Sekayu
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	777.795.000,00	2,56	0	0	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	777.795.000,00	2,56	0	0	
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	777.795.000,00	2,56	0	0	Kecamatan Sekayu
1. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS) RDTR	380.000.000,00	0	0	0	Kecamatan Keluang

Kawasan Perkotaan Kecamatan Keluang					
2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Tungal Jaya	380.000.000,00	5	0	0	Kecamatan Tungal Jaya
3. Administrasi Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	17.795.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.060.693.174,00	9,75	60.399.175,00	5,69	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.047.851.174,00	9,81	60.399.175,00	5,76	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	62.648.000,00	20	9.126.475,00	14,57	Kecamatan Sekayu
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	70.938.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	49.023.000,00	5	10.964.700,00	22,37	Kecamatan Sekayu
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	204.786.000,00	25	36.600.000,00	17,87	Kecamatan Sekayu
Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	51.798.000,00	5	2.208.000,00	4,26	Kecamatan Sekayu
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	608.658.174,00	5	1.500.000,00	0,25	Kecamatan Sekayu
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12.842.000,00	5	0	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	12.842.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.852.945.250,00	16,23	244.079.818,00	6,33	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.852.945.250,00	16,23	244.079.818,00	6,33	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.401.285.250,00	23,9	193.974.818,00	8,08	
1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.903.172.000,00	25	95.861.568,00	5,04	Kecamatan Sekayu
2. Pembangunan Ruang terbuka Hijau Desa Sumber Sari Kec. Tungkal jaya	200.000.000,00	0	0	0	Kecamatan Tungkal Jaya
3. Pembangunan Taman Rt. 06 Dusun 1 desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya	200.000.000,00	0	0	0	Kecamatan Tungkal Jaya
4. Pembayaran gagal bayar Tahun anggaran 2024 Nama Paket : PEMBUATAN TAMAN RANTAU PANJANG	98.113.250,00	100	98.113.250,00	100	Kecamatan Sekayu
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.451.660.000,00	3,54	50.105.000,00	3,45	
1. PENGADAAN KENDARAAN SKYLIFT	1.400.000.000,00	0	0	0	Kecamatan Sekayu
2. PENGADAAN PERALATAN PERTAMANAN	51.320.000,00	100	50.105.000,00	97,63	Kecamatan Sekayu
3. Administrasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	340.000,00	0	0	0	Kecamatan Sekayu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	127.423.000,00	12,66	12.741.774,00	10	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh	127.423.000,00	12,66	12.741.774,00	10	

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	62.369.000,00	5	10.941.774,00	17,54	Kecamatan Sekayu
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.054.000,00	20	1.800.000,00	2,77	Kecamatan Sekayu
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.711.000,00	5	7.265.600,00	14,62	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.711.000,00	5	7.265.600,00	14,62	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat	49.711.000,00	5	7.265.600,00	14,62	Kecamatan Sekayu
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84.114.000,00	25	15.984.999,00	19	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	84.114.000,00	25	15.984.999,00	19	
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	84.114.000,00	25	15.984.999,00	19	Kecamatan Sekayu

Hidup tingkat Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.876.770.628,00	27	2.192.548.433,00	20,16	
Pengelolaan Sampah	10.876.770.628,00	27	2.192.548.433,00	20,16	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	9.222.520.053,00	26,15	1.815.323.463,00	19,68	
1. Belanja Bak Amrol	220.000.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
2. Belanja Mobil Pick Up	1.079.997.150,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
3. BELANJA MOBIL TRUCK SAMPAH	1.400.000.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
4. Belanja Motor Roda Tiga	688.000.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
5. Belanja Perahu	15.000.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
6. Mesin Perahu Bermotor	9.805.000,00	5	0	0	Kecamatan Sekayu
7. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Makan Minum Rapat Lembur	29.736.000,00	100	29.736.000,00	100	Kecamatan Sekayu
8. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Motor Roda Tiga	436.007.000,00	100	436.007.000,00	100	Kecamatan Sekayu
9. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Mobil Truck	407.328.000,00	100	407.328.000,00	100	Kecamatan Sekayu
10. Pembayaran gagal bayar tahun anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Motor Sampah	178.108.000,00	100	178.108.000,00	100	Kecamatan Sekayu
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4.758.538.903,00	25	764.144.463,00	16,06	Kecamatan Sekayu

Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	75.000.000,00	0	0	0	Kecamatan Sekayu
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.579.250.575,00	33,24	377.224.970,00	23,89	Kecamatan Sekayu
<i>1. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>	<i>1.405.693.200,00</i>	<i>25</i>	<i>203.667.595,00</i>	<i>14,49</i>	<i>Kecamatan Sekayu</i>
<i>2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket: Belanja Makan Minum Rapat Lembur</i>	<i>24.042.500,00</i>	<i>100</i>	<i>24.042.500,00</i>	<i>100</i>	<i>Kecamatan Sekayu</i>
<i>3. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket: Belanja Bangunan Gedung (Bangunan TPST Kasmaran)</i>	<i>149.514.875,00</i>	<i>100</i>	<i>149.514.875,00</i>	<i>100</i>	<i>Kecamatan Sekayu</i>

Kendala Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

NAMA KEGITAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI BULAN MEI			KENDALA / TINDAK LANJUT
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN		
		(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
Dinas Lingkungan Hidup	47.827.958.990,00	34,78	15.331.879.578,00	32,06	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.998.506.938,00	41,65	12.798.859.779,00	41,29	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.682.762,00	22,02	9.425.000,00	14,8	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.494.000,00	30	4.446.000,00	19,77	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.688.762,00	65	4.979.000,00	57,3	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	32.500.000,00	5	0	0	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.168.825.624,00	41,67	3.369.890.165,00	33,14	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.168.825.624,00	41,67	3.369.890.165,00	33,14	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	99.116.950,00	50	49.199.700,00	49,64	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	99.116.950,00	50	49.199.700,00	49,64	Pelaksanaan dibulan Nopember
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.642.000,00	20	11.196.600,00	12,35	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.642.000,00	20	11.196.600,00	12,35	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	929.292.574,00	48,63	435.560.818,00	46,87	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.873,00	5	0	0	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	494.585.900,00	75,75	374.650.000,00	75,75	-
<i>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>119.935.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Peralatan Perlengkapan Kantor</i>	<i>374.650.000,00</i>	<i>100</i>	<i>374.650.000,00</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.272,00	5	0	0	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.972,00	5	0	0	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.716.561,00	5	0	0	-
Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0	0	0	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	0	0	0	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.999.996,00	65	60.910.818,00	60,91	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	0	0	0	
Pengadaan Mebel	60.000.000,00	0	0	0	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.885.605.163,00	41,67	8.663.239.426,00	45,87	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	440.067.252,00	41,67	117.143.026,00	26,62	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.445.537.911,00	41,67	8.546.096.400,00	46,33	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.341.865,00	38,67	260.348.070,00	37,12	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.240.000,00	15	28.599.905,00	10,86	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.054.559,00	48,42	128.820.559,00	48,42	-

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.234.000,00	0	0	0	Dalam Proses
2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	128.820.559,00	100	128.820.559,00	100	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.047.306,00	59,83	102.927.606,00	59,83	-
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.119.700,00	0	0	0	Dalam Proses
2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	102.927.606,00	100	102.927.606,00	100	-
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	777.795.000,00	2,56	0	0	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	777.795.000,00	2,56	0	0	
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	777.795.000,00	2,56	0	0	-
1. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Keluang	380.000.000,00	0	0	0	Efisiensi Anggaran
2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Tungkal Jaya	380.000.000,00	5	0	0	Proses Pelaksanaan
3. Administrasi Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	17.795.000,00	5	0	0	Proses Pelaksanaan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.060.693.174,00	9,75	60.399.175,00	5,69	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.047.851.174,00	9,81	60.399.175,00	5,76	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	62.648.000,00	20	9.126.475,00	14,57	-
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	70.938.000,00	5	0	0	-
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	49.023.000,00	5	10.964.700,00	22,37	Sedang berjalan
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	204.786.000,00	25	36.600.000,00	17,87	Sedang berjalan
Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	51.798.000,00	5	2.208.000,00	4,26	Sedang berjalan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	608.658.174,00	5	1.500.000,00	0,25	Sedang berjalan
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12.842.000,00	5	0	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	12.842.000,00	5	0	0	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.852.945.250,00	16,23	244.079.818,00	6,33	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.852.945.250,00	16,23	244.079.818,00	6,33	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.401.285.250,00	23,9	193.974.818,00	8,08	
1. <i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	1.903.172.000,00	25	95.861.568,00	5,04	-
2. <i>Pembangunan Ruang terbuka Hijau Desa Sumber Sari Kec. Tungal jaya</i>	200.000.000,00	0	0	0	Proses Pelaksanaan
3. <i>Pembangunan Taman Rt. 06 Dusun 1 desa Beji Mulyo Kec. Tungal Jaya</i>	200.000.000,00	0	0	0	Proses Pelaksanaan
4. <i>Pembayaran gagal bayar Tahun anggaran 2024 Nama Paket : PEMBUATAN TAMAN RANTAU PANJANG</i>	98.113.250,00	100	98.113.250,00	100	-

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.451.660.000,00	3,54	50.105.000,00	3,45	
1. PENGADAAN KENDARAAN SKYLIFT	1.400.000.000,00	0	0	0	Proses Pelaksanaan
2. PENGADAAN PERALATAN PERTAMANAN	51.320.000,00	100	50.105.000,00	97,63	-
3. Administrasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	340.000,00	0	0	0	Proses Pelaksanaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	127.423.000,00	12,66	12.741.774,00	10	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	127.423.000,00	12,66	12.741.774,00	10	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	62.369.000,00	5	10.941.774,00	17,54	Proses Pelaksanaan
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.054.000,00	20	1.800.000,00	2,77	Proses Pelaksanaan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.711.000,00	5	7.265.600,00	14,62	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.711.000,00	5	7.265.600,00	14,62	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga	49.711.000,00	5	7.265.600,00	14,62	Proses Pelaksanaan

masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat					
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84.114.000,00	25	15.984.999,00	19	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	84.114.000,00	25	15.984.999,00	19	
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	84.114.000,00	25	15.984.999,00	19	<i>Proses Pelaksanaan</i>
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.876.770.628,00	27	2.192.548.433,00	20,16	
Pengelolaan Sampah	10.876.770.628,00	27	2.192.548.433,00	20,16	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	9.222.520.053,00	26,15	1.815.323.463,00	19,68	
1. Belanja Bak Amrol	220.000.000,00	5	0	0	<i>Proses Pelaksanaan</i>
2. Belanja Mobil Pick Up	1.079.997.150,00	5	0	0	<i>Proses Pelaksanaan</i>
3. BELANJA MOBIL TRUCK SAMPAH	1.400.000.000,00	5	0	0	<i>Proses Pelaksanaan</i>
4. Belanja Motor Roda Tiga	688.000.000,00	5	0	0	<i>Proses Pelaksanaan</i>
5. Belanja Perahu	15.000.000,00	5	0	0	<i>Proses Pelaksanaan</i>
6. Mesin Perahu Bermotor	9.805.000,00	5	0	0	<i>Proses Pelaksanaan</i>
7. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Makan Minum Rapat Lembur	29.736.000,00	100	29.736.000,00	100	-
8. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Motor Roda Tiga	436.007.000,00	100	436.007.000,00	100	-
9. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Mobil Truck	407.328.000,00	100	407.328.000,00	100	-

10. Pembayaran gagal bayar tahun anggaran 2024 Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Motor Sampah	178.108.000,00	100	178.108.000,00	100	-
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4.758.538.903,00	25	764.144.463,00	16,06	-
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	75.000.000,00	0	0	0	Proses Pelaksanaan
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.579.250.575,00	33,24	377.224.970,00	23,89	-
1. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.405.693.200,00	25	203.667.595,00	14,49	Proses Pelaksanaan
2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket: Belanja Makan Minum Rapat Lembur	24.042.500,00	100	24.042.500,00	100	-
3. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Nama Paket: Belanja Bangunan Gedung (Bangunan TPST Kasmaran)	149.514.875,00	100	149.514.875,00	100	-

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin menyusun usulan Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, PD terkait) yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan dan musrenbang Kabupaten serta reses DPRD. Daftar usulan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL. 2.2.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
(DPRD Kab. MUBA) Tahun 2025

N O	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	SKPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI				Koefisiensi	
							SEKWAN	MITRA	SKPD	TAPD		
1.	14-07-2025	Edi Pramono	Penyediaan Sarana Persampahan (Pengelolaan Persampahan)	Pengadaan kendaraan roda 3 (betor) angkutan sampah Desa Kasmaran Kec. Babat Toman	Dinas Lingkungan Hidup	Dibatalkan	-	-	-	-	3	Unit
2.	14-07-2025	SUITO	Penyediaan Sarana Persampahan (Pengelolaan Persampahan)	Pengadaan kendaraan roda 3 (betor) angkutan sampah Desa Kasmaran Kec. Babat Toman	Dinas Lingkungan Hidup	Validasi Mitra Bappeda	Telah Sesuai dengan Hasil Dokumen Telaah Pokir	-	-	-	3	unit
3.	14-07-2025	H. AMRI ANDI, ST	Penyediaan Sarana Persampahan (Pengelolaan Persampahan)	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya	Dinas Lingkungan Hidup	Validasi Mitra Bappeda	Telah Sesuai dengan Hasil Dokumen Telaah Pokir	-	-	-	1	Paket
4.	14-07-2025	Jonkenedy	Penyediaan Sarana Persampahan (Pengelolaan Persampahan)	Pengadaan Bentor Roda 3 untuk Pengangkutan Sampah Desa Sinar Tungkal Kec.Lalan	Dinas Lingkungan Hidup	Validasi Mitra Bappeda	Telah Sesuai dengan Hasil Dokumen Telaah Pokir	-	-	-	2	Unit

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk mendukung Prioritas pembangunan daerah, Prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah seperti pada tabel 3.1.1 berikut :

Tabel 3.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Indikator Sasaran		Program
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.29	1.	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup
					2.	Indeks kualitas Lingkungan Hidup Yang Dicapai	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman hayati (KEHATI)
					4.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Mengajukan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Perogram Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
					5.	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	program Peningkatan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
					6.	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
					7.	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good govermance)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	100%	1.	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Rencana program dan kegiatan ini mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari 8 Program dan 16 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

URAIAN	DPA AWAL (Rp)	DPA PERUBAHAN (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.1.130.000.000,00.	Rp.1.130.000.000,00	Rp.0,00
Retribusi Daerah	Rp.1.130.000.000,00.	Rp.1.130.000.000,00.	Rp.0,00
Jumladfh Pagu	Rp.47.694.443.605,00.	Rp.47.827.958.990,00.	Rp.133.515.385,00
BELANJA OPERASI	Rp.41.951.578.955,00.	Rp.41.601.055.415,00.	(Rp.350.323.540,00)
Belanja Pegawai	Rp.9.914.222.744,00.	Rp.10.168.825.624,00.	(Rp.254.602.880,00)
Belanja Barang dan Jasa	Rp.32.037.156.211,00	Rp.31.432.229.791,00	(Rp.604.926.420,00)
BELANJA MODAL	Rp.5.743.064.650,00.	Rp.6.226.903.575,00.	Rp.483.838.925,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.5.343.064.650,00	Rp.5.579.275.450,00	Rp.236.210.800,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.400.000.000,00	Rp.647.628.125,00	Rp247.628.125,00

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini Program Kegiatan dan sub kegiatan menitikkan beratkan pada isu – isu penting seperti Pengelolaan sampah dimana isu ini adalah salah satu isu lingkungan yang kompleks dan mendesak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Permasalahan ini bukan hanya tentang bagaimana mengumpulkan dan membuang sampah, tetapi juga mencakup seluruh siklus hidup sampah, mulai dari **produksi, konsumsi, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali**. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi.

Berikut adalah beberapa isu utama yang sering muncul dalam pengelolaan sampah:

1. Peningkatan Volume Sampah:

- **Deskripsi:** Seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan gaya hidup konsumtif, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat secara signifikan. Hal ini seringkali melebihi kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah yang tersedia.
- **Dampak:** TPA cepat penuh, penumpukan sampah di lingkungan, dan peningkatan beban kerja bagi petugas kebersihan.

2. Kurangnya Pemilahan Sampah dari Sumbernya:

- **Deskripsi:** Masyarakat cenderung mencampur semua jenis sampah (organik, anorganik, B3) dalam satu wadah. Ini menyulitkan proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut.
- **Dampak:** Potensi daur ulang tidak termanfaatkan optimal, sampah organik mencemari sampah anorganik, dan TPA dipenuhi oleh material yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.

3. Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang Belum Memadai:

- **Deskripsi:** Banyak daerah masih kekurangan fasilitas pengolahan sampah modern seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), fasilitas daur ulang, atau teknologi *waste-to-energy*. TPA seringkali masih berupa *open dumping* atau *controlled landfill* yang kurang memenuhi standar.
- **Dampak:** Pencemaran tanah dan air, bau tidak sedap, emisi gas metana (gas rumah kaca), dan risiko kesehatan bagi pemulung.

4. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:

- **Deskripsi:** Pengelolaan sampah membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur, operasional, dan sumber daya manusia. Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala anggaran dalam mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah.
- **Dampak:** Pelayanan pengangkutan sampah tidak merata, kurangnya pemeliharaan fasilitas, dan inovasi yang terbatas.

5. Perilaku Masyarakat dan Kurangnya Kesadaran Lingkungan:

- **Deskripsi:** Kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurangnya partisipasi dalam program daur ulang, dan rendahnya kesadaran akan dampak sampah terhadap lingkungan masih menjadi tantangan besar.
- **Dampak:** Sampah berserakan di jalanan, sungai, dan laut, menyebabkan banjir, pencemaran visual, dan kerusakan ekosistem.

• Dampak Negatif dari Pengelolaan Sampah yang Buruk

- **Pencemaran Lingkungan:** Pencemaran tanah, air (sungai, danau, laut), dan udara (bau, emisi gas rumah kaca).
- **Gangguan Kesehatan:** Penyebaran penyakit (diare, demam berdarah, ISPA), habitat vektor penyakit (tikus, lalat, nyamuk).
- **Kerugian Ekonomi:** Biaya pembersihan yang tinggi, penurunan nilai estetika lingkungan (mengganggu pariwisata), dan hilangnya potensi ekonomi dari material daur ulang.
- **Bencana Alam:** Penyumbatan saluran air penyebab banjir, longsor TPA.

• Solusi dan Pendekatan Berkelanjutan

Untuk mengatasi isu-isu ini, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat), dengan fokus pada:

- **Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle):** Mengurangi produksi sampah, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang.
- **Peningkatan Kapasitas TPA dan Teknologi Pengolahan:** Mengembangkan TPA yang memenuhi standar (sanitary landfill) atau teknologi pengolahan sampah lainnya.
- **Edukasi dan Kampanye Lingkungan:** Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.
- **Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum:** Memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah.
- **Pengembangan Ekonomi Sirkular:** Mendorong industri dan masyarakat untuk melihat sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkualitas bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

**Tabel 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
1	2					3	4	8	9	10	11	12
						Dinas Lingkungan Hidup				48.047.109.119,00	47.694.443.605,00	55.218.972.335,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				48.047.109.119,00	47.694.443.605,00	55.218.972.335,00
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				48.047.109.119,00	47.694.443.605,00	55.218.972.335,00
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup	100 %	100 %	31.533.279.758,00	30.630.614.244,00	39.342.676.183,00
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	129.988.000,00	129.988.000,00	129.988.000,00
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	44.988.000,00	44.988.000,00	22.494.000,00
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	8.688.762,00
	2	11	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						

						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	10 Data	65.000.000,00	65.000.000,00	32.500.000,00	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.243.622.744,00	9.914.222.744,00	9.914.222.744,00
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.243.622.744,00	9.914.222.744,00	11.792.706.880,00	
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	49.917.250,00	49.917.250,00	49.917.250,00	
	2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	49.917.250,00	49.917.250,00	99.116.950,00	
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	161.472.000,00	161.472.000,00	161.472.000,00	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	61.614.000,00	61.614.000,00	0,00	
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	99.858.000,00	99.858.000,00	90.642.000,00	
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	889.815.387,00	889.815.387,00	889.815.387,00
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	29.998.873,00	29.998.873,00	29.998.873,00
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	199.826.300,00	199.826.300,00	494.585.900,00
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	59.992.272,00	59.992.272,00	59.992.272,00
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	199.997.942,00	199.997.942,00	99.998.972,00
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	54.716.561,00
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	99.999.996,00

	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	19.488.870.677,00	18.915.605.163,00	18.915.605.163,00
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	440.067.252,00	440.067.252,00	442.467.252,00
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19.048.803.425,00	18.475.537.911,00	25.163.425.900,00
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	469.593.700,00	469.593.700,00	469.593.700,00
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	263.240.000,00	263.240.000,00	263.240.000,00
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	137.234.000,00	137.234.000,00	266.054.559,00
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	69.119.700,00	69.119.700,00	172.047.306,00
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100 %	100 %	800.000.000,00	800.000.000,00	397.795.000,00
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	397.795.000,00
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	66.29 indeks	66.29 indeks	1.582.463.924,00	1.582.463.924,00	1.060.693.174,00
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	66.29 Indeks	66.29 Indeks	1.550.415.924,00	1.550.415.924,00	1.550.415.924,00
	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.082.000,00	125.082.000,00	62.648.000,00
	2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota						
							Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	175.486.750,00	175.486.750,00	70.938.000,00

	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	99.983.000,00	99.983.000,00	49.023.000,00
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						
							Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	204 Paket	204 Paket	345.360.000,00	345.360.000,00	204.786.000,00
	2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						
							Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan	99.986.000,00	99.986.000,00	51.798.000,00
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	850 Dokumen	850 Dokumen	704.518.174,00	704.518.174,00	608.658.174,00
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	32.048.000,00	32.048.000,00	32.048.000,00
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi						
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.048.000,00	32.048.000,00	12.842.000,00
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	-	-	-	3.932.000.000,00	3.932.000.000,00	3.607.945.250,00
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	-	3.932.000.000,00	3.932.000.000,00	3.932.000.000,00
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						

							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275,94 Ha	275,94 Ha	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00	2.156.285.250,00
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	5 Unit	1.452.000.000,00	1.452.000.000,00	1.451.660.000,00
5	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100 %	100 %	253.735.000,00	253.735.000,00	127.423.000,00
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100 %	100 %	253.735.000,00	253.735.000,00	253.735.000,00
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	12 Dokumen	124.998.000,00	124.998.000,00	62.369.000,00
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	128.737.000,00	128.737.000,00	65.054.000,00

6	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	99.937.000,00	99.937.000,00	49.711.000,00
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	99.937.000,00	99.937.000,00	99.937.000,00
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	2 Lembaga	99.937.000,00	99.937.000,00	49.711.000,00
7	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	171.952.000,00	171.952.000,00	84.114.000,00
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadila	100 %	100 %	171.952.000,00	171.952.000,00	171.952.000,00
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						

							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	26 Pengaduan	26 Pengaduan	171.952.000,00	171.952.000,00	84.114.000,00
8	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan sampah	100 %	100 %	9.673.741.437,00	10.223.741.437,00	10.548.614.728,00
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	100 %	100 %	9.673.741.437,00	10.223.741.437,00	10.223.741.437,00
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	90 Kelompok	90 Kelompok	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	3 Dokumen	7.913.741.437,00	8.463.741.437,00	8.908.044.153,00
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						

						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	21516 Ton	21516 Ton	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.565.570.575,00
	J U M L A H								48.047.109.119,00	47.694.443.605,00	55.218.972.335,00

a. Catatan Penting.

Sebagai bagian penutup dari Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin ini secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah dan selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2025 – 2029 serta mempertimbangkan Rencana kerja terkait dengan visi dan misi Bupati Musi Banyuasin.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk: a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; b. menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA - P) Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk Peng-evaluasian hasil program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tolak ukur rencana capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Sekayu, 25 Juni 2025

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



OKTARIZAL, S.E
PEMBINA TK. I, Gol. IV/b
NIP. 19771029 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kolonel Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Telp. (0714) - 321486 Fax. (0714) – 322855 Kode Pos: 30711
Email : dlhmuba2018@gmail.com

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MUSI BANYUASIN

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓				
2	Pengolahan data dan informasi.	✓				
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	✓				
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD.	✓				
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.	✓				
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten.	✓				
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓				
8	Penelaahan usulan masyarakat.	✓				
9	Perumusan kegiatan prioritas.	✓				
10	Pelaksanaan Forum-PD					
	10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓				
	10.b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓				
	10.c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓				
	10.d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran bupati.	✓				
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓				
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.	✓				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓				

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 (RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Diterima Tgl.
Dikembalikan Tgl.

FORMAT SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		KONDISI RANCANGAN RENJA	SARAN PERBAIKAN
SK PENETAPAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL		Ada Ada Ada Belum ada	Perlu dilengkapi dengan nomor Surat Keputusan Perlu melengkapi penomoran halaman Lengkapi daftar tabel
BAB I PENDAHULUAN			
1,1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas mengenai : - Pengertian Renja PD - Proses Penyusunan Renja PD - Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD		Belum ada Belum ada Ada	Tambahkan pengertian renja PD dalam narasi Tambahkan proses penyusunan renja PD dalam Tambahkan Keterkaitan Renja PD dengan K/L dan Renja Provinsi
1,2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, ketentuan lain yang mengatur SOTK, Kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD;		Ada	- Update UU Tentang RPJMN, UU Tentang Perimbangan Keuangan, UU Tentang Pemerintahan Daerah, Tambahkan Peraturan Tentang RPJPD Kab.Musi Banyuasin
1,3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja PD;		Ada	
1,4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen		Ada	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II			
2,1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II (Januari - Juni 2025) - Tabel 2.1. (T-C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II (Januari - Juni 2025)		Ada Ada	Perbaiki judul Tabel 2.1

FORMAT SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		KONDISI RANCANGAN RENJA	SARAN PERBAIKAN
2,2	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat - Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; - Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; - Tabel 2.2. (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	Belum ada Belum ada Belum ada	Tambahkan uraian terkait proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh Tambahkan uraian terkait kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Tambahkan Tabel 2.2. (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		Ada	Pindahkan Tabel Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD ke BAB III (Saat ini ada di BAB IV)
BAB IV PENUTUP			
a. Catatan Penting b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut		Belum ada Belum ada Belum ada	Tambahkan uraian catatan penting terkait hasil evaluasi Tambahkan uraian terkait Kaidah - kaidah pelaksanaan perubahan Renja PD Tambahkan Uraian terkait Rencana tindak lanjut
		Sekayu, 2025 Bappeda Kab. Muli Banyuwangi, Verifikator Ir. H. Amran Syarif, S.T., M.T NIP. 19740904 200212 1 006	

**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 (RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Diterima Tgl.
Dikembalikan Tgl.

FORMAT SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		KONDISI RANCANGAN RENJA	SARAN PERBAIKAN
SK PENETAPAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL		Ada Ada Ada Ada	
BAB I PENDAHULUAN			
1,1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas mengenai : - Pengertian Renja PD - Proses Penyusunan Renja PD - Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	Ada Ada Ada		
1,2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, ketentuan lain yang mengatur SOTK, Kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD;	Ada		
1,3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja PD;	Ada		
1,4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen	Ada		
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II			
2,1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II (Januari - Juni 2025) - Tabel 2.1. (T-C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II (Januari - Juni 2025)	Ada Ada		

FORMAT SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		KONDISI RANCANGAN RENJA	SARAN PERBAIKAN
2,2	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat - Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan penangku kepentingan tersebut diperoleh; - Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; - Tabel 2.2. (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	Ada Ada Ada	
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Ada	
BAB IV	PENUTUP		
	a. Catatan Penting b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut	Ada Ada Ada	
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Penerima Hasil Verifikasi, Ritumsedi, S.T., M.Si NIP. 197910092010011012 Sekayu, 2025 Bappeda Kab. Musi Banyuasin, Verifikator  Ir. H. Amrah Syarif, S.T., M.T NIP. 197409042002121006			



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kol. Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Serasan Jaya, Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321035 / Fax. (0714) 322535

CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN P - RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Disusun oleh/ Tanggal	Nurhasanah, S.Psi 23 Juni 2025
	Direviu oleh/ Tanggal	Elsa Paulina, S.E., M.Si 24 Juni 2025
	Disetujui oleh/ Tanggal	Emmy Rosmala, S.Pd., M.Si 24 Juni 2025

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 706/ST/ITDA/2025 tanggal 19 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dengan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. Kelengkapan dokumen pendukung

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu atas kelengkapan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang disampaikan kepada APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

- Surat Permohonan Reviu Perangkat Daerah;
- SK Tim Penyusun P-Renja Tahun 2025;
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang P-RKPD Tahun 2025;
- Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Renstra Tahun 2023-2026;
- Berita Acara Ratek P-Renja Tahun 2025.

2. Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-Renja dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-RKPD

Kesimpulan

Berdasarkan hasil revidi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu pada Bab III dalam P-Renja telah sesuai dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-RKPD (terlampir)

3. Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam P-Renja dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Renstra

Kesimpulan

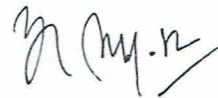
Berdasarkan hasil revidi, Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Perangkat Daerah pada Bab III dalam P-Renja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target pada Bab IV dalam Renstra. (terlampir)

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Banyuasin,

Plt. Oktarizal, S.E
NIP. 19771029 200212 1 007

Sekayu, 25 Juni 2025

Pengendali Teknis,



Emmy Rosmala, S.Pd., M.Si
NIP 19750206 200701 2 003



Sekayu, 27 Agustus 2025

Nomor : B-000.2/ 400 DLH/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Yth. Plt. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin
di

Sekayu.

Menindaklanjuti Surat Inspektur Kab. Musi Banyuasin Nomor : 700/607.14/ LHR – ITDA / 2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan uraian hasil reviu dan rekomendasi Tim APIP, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung

Berdasarkan hasil reviu atas kelengkapan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang disampaikan kepada APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

- Surat Permohonan Reviu Perangkat Daerah;
- SK Tim Penyusun P – Renja Tahun 2025;
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang P – RKPD Tahun 2025;
- Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Renstra Tahun 2023 – 2026;
- Berita Acara Ratek P-Renja Tahun 2025.

Tanggapan :

Berdasarkan hasil reviu bahwa penyampaian Rancangan Akhir Peraturan Bupati tentang P-RKPD 2025 telah dilengkapi dengan dokumen tersebut, kami ucapkan terima kasih untuk hasil reviu oleh Tim APIP Kabupaten Musi Banyuasin.

22/8/25

2. Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator target dan Pagu dalam P-Renja dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator target dan Pagu dalam P-RKPD

Berdasarkan hasil revidi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Pagu pada Bab III dalam P – Renja telah sesuai dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Kelompok Sasaran pada Berita Acara Pembahasan Usulan dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD telah sesuai dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif, dan Kelompok Sasaran pada Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Tanggapan :

Berdasarkan hasil revidi pencantuman Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Kelompok Sasaran pada Berita Acara Pembahasan Usulan dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD telah sesuai pencantuman Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif, dan Kelompok Sasaran pada Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut kami Tim Penyusun RKPD mengucapkan terima kasih untuk hasil revidi dari Tim APIP Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam P – Renja dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

Berdasarkan hasil revidi, Rumusan Tujuan, Sasaran dan Target pada Bab III dalam P – Renja tidak sesuai dengan Rumusan Tujuan, Sasaran dan Target pada Bab IV dalam Renstra

Tanggapan :

Terkait hasil revidi oleh tim APIP Kabupaten Musi Banyuasin pada Rumusan Tujuan, Sasaran dan Target pada Bab III dalam P – Renja tidak sesuai dengan Rumusan Tujuan, Sasaran dan Target pada Bab IV dalam Renstra, akan segera kami lakukan perbaikan pada P – Renja. Dan Selanjutnya dengan hal tersebut kami Tim Penyusun RKPD mengucapkan terima kasih untuk hasil revidi dari Tim APIP Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Apresiasi

Tim reviu Rancangan Akhir Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan Kerjasama yang baik dari Tim Penyusun Rancangan Akhir Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin atas kesediaannya memberikan dokumen/data yang diperlukan sehingga terlaksananya reviu dokumen Rancangan Akhir Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Tanggapan :

Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dari tim reviu Rancangan Akhir Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Semoga kerjasama yang baik akan terus terjalin dalam rangka mewujudkan perencanaan Pembangunan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



OKTARIZAL, S.E
PEMBINA TK. I, Gol. IV/b
NIP. 19771029 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL REVIU P-RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 700/607.14/LHR-ITDA/2025
TANGGAL : 25 JUNI 2025

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jl. Kol. Wahid Udin LK. I No. 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu
MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN
Telp. (0714) 321035 FAX. (0714) 322535



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kol. Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Serasan Jaya, Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321035 / Fax. (0714) 322535

**LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN P-RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan tahunan yang juga merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah juga merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan rencana Pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan dan mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
15. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20/KPTS-ITDA/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2025.

III. TUJUAN REVIU

Reviu Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah, telah :

1. Didukung oleh dokumen yang memadai;
2. Berpedoman pada PERKADA P-RKPD.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

1. Kelengkapan dokumen pendukung;
2. Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-Renja dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-RKPD;
3. Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam P-Renja dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Renstra.

V. METODOLOGI REVIU

Reviu Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan dengan mengumpulkan dan melakukan penelaahan dokumen serta membuat simpulan.

VI. GAMBARAN UMUM

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra);
2. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor B-660/117/SK/DLH-I/2025 Tanggal 02 Juni 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang telah disusun disampaikan kepada APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dilakukan reviu. Hasil reviu APIP untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penyempurnaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin untuk dilakukan harmonisasi sebelum ditetapkan sebagai P-Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

VII. URAIAN HASIL REVIU

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung

Berdasarkan hasil reviu atas kelengkapan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang disampaikan kepada APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Reviu Perangkat Daerah;
 - b. SK Tim Penyusun P-Renja Tahun 2025;
 - c. Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang P-RKPD Tahun 2025;
 - d. Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - e. Renstra Tahun 2023-2026;
 - f. Berita Acara Ratek P-Renja Tahun 2025
2. **Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-Renja dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-RKPD**
- Berdasarkan hasil reviu, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu pada Bab III dalam P-Renja telah sesuai dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu pada Bab V dalam P-RKPD. (terlampir)
3. **Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam P-Renja dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Renstra**
- Berdasarkan hasil reviu, Rumusan Tujuan, Sasaran dan Target pada Bab III dalam P-Renja tidak sesuai dengan Rumusan Tujuan, Sasaran dan Target pada Bab IV dalam Renstra. (terlampir)

VIII. TEMUAN

Terdapat Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam P-Renja tidak sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Renstra, seperti dalam uraian lampiran hasil reviu nomor urut 3.

IX. REKOMENDASI

Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin merekomendasikan kepada Tim Penyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin untuk menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan terhadap P-Renja tersebut.

X. APRESIASI

Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama pejabat/pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga terlaksananya kegiatan reviu P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sekayu, 25 Juni 2025

Plt. Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin,



Syailendra, S.E
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP 19690711 199803 1 006

Tembusan:
Kepala Bappeda Kab. Muba di Sekayu

No.	P- Renja				P-RKPD				Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.128.198.925	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.128.198.925	Sesuai
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			18.128.198.925	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			18.128.198.925	Sesuai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9.058.572.112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9.058.572.112	Sesuai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	123.204.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	123.204.300	Sesuai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	68.634.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	68.634.300	Sesuai
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	22.820.000	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	22.820.000	Sesuai
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	11 Data	31.550.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	11 Data	31.550.000	Sesuai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.524.002.037	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.524.002.037	Sesuai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6.524.002.037	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6.524.002.037	Sesuai
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %	43.925.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %	43.925.000	Sesuai
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	43.925.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	43.925.000	Sesuai

Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	100 %	99.250.000	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	100 %	99.250.000	Sesuai
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0	Sesuai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99.250.000	Sesuai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	872.993.679	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	872.993.679	Sesuai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.737.525	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.737.525	Sesuai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	172.570.715	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	172.570.715	Sesuai
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.004.583	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.004.583	Sesuai
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	168.738.213	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	168.738.213	Sesuai
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	102.531.541	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	102.531.541	Sesuai
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Sesuai
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.986.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.986.000	Sesuai
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.375.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.375.000	Sesuai
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	100 %	205.223.030	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	100 %	205.223.030	Sesuai
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	131.246.400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	131.246.400	Sesuai
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor		131.246.400	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor		131.246.400	Sesuai

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	73,976,630	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	73,976,630	Sesuai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	749,720,998	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	749,720,998	Sesuai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176,571,396	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176,571,396	Sesuai
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	573,149,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	573,149,600	Sesuai
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur Berfungsi dengan baik	100 %	440,253,070	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur Berfungsi dengan baik	100 %	440,253,070	Sesuai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	6 Unit	318,339,570	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	6 Unit	318,339,570	Sesuai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91,025,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91,025,000	Sesuai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	30,888,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	30,888,500	Sesuai
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	8 Desa	97,640,900	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	8 Desa	97,640,900	Sesuai
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terpenuhinya Kerjasama antar desa Terpenuhinya Kerjasama antar Desa	8 Desa	97,640,900	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terpenuhinya Kerjasama antar desa Terpenuhinya Kerjasama antar Desa	8 Desa	97,640,900	Sesuai
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	53,747,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	53,747,000	Sesuai

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	43.893.900	8 Dokumen	43.893.900	Sesuai
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	80 %	80 %	6.154.538.513	Sesuai
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6.154.538.513	80 %	6.154.538.513	Sesuai
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	145.701.198	1 Dokumen	145.701.198	Sesuai
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	251.788.075	65 Dokumen	251.788.075	Sesuai
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	143.434.000	3 Dokumen	143.434.000	Sesuai
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5.161.078.240	2972 Orang	5.161.078.240	Sesuai
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	39.952.000	229 Dokumen	39.952.000	Sesuai
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	152.094.000	229 Dokumen	152.094.000	Sesuai
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	1 Laporan	0	Sesuai
Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat				Sesuai
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				Sesuai
Honorarium Rohaniwan	Honorarium Rohaniwan				Sesuai
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				Sesuai

	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	229 Dokumen	52.675.000	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	229 Dokumen	52.675.000	Sesuai
	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	55.464.000	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	55.464.000	Sesuai
	Facilitasi Penetapan dan Penegakan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegakan Batas Desa	3 Desa	55.464.000	Facilitasi Penetapan dan Penegakan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegakan Batas Desa	3 Desa	55.464.000	Sesuai
	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15 Dokumen	96.888.000	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15 Dokumen	96.888.000	Sesuai
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibangun Jumlah Keluarga Inklusif yang dibangun Jumlah Lembaga Masyarakat adat dan Masyarakat hukum adat yang dibangun	100 150 15 % Keluarga Lembaga	2.817.447.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibangun Jumlah Keluarga Inklusif yang dibangun Jumlah Lembaga Masyarakat adat dan Masyarakat hukum adat yang dibangun	100 150 15 % Keluarga Lembaga	2.817.447.400	Sesuai
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kelengkapan Masyarakat Desa	100 %	2.817.447.400	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kelengkapan Masyarakat Desa	100 %	2.817.447.400	Sesuai
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	1.046.484.250	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	1.046.484.250	Sesuai
	Facilitasi Penguatan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	0	Facilitasi Penguatan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	0	Sesuai

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	117.581,450	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	117.581,450	Sesuai
Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	152.736,225	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	152.736,225	Sesuai
Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	482.682,658	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	482.682,658	Sesuai
Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	91.272,800	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	91.272,800	Sesuai
Facilitasi Penyelenggaraan Ketrampilan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketrampilan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	15 Dokumen	0	Facilitasi Penyelenggaraan Ketrampilan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketrampilan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	15 Dokumen	0	Sesuai
Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	926.689,817	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	926.689,817	Sesuai
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	0	Sesuai

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45 Keluarga	0	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45 Keluarga	0	Sesuai
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana			23,330,072,566	23,330,072,566	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana			23,330,072,566	Sesuai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23,330,072,566	23,330,072,566	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23,330,072,566	Sesuai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			23,330,072,566	23,330,072,566	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			23,330,072,566	Sesuai
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	12,308,689,970	12,308,689,970	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	12,308,689,970	Sesuai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang Dilaksanakan Sangat Tepat	100 %	51,105,000	51,105,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang Dilaksanakan Sangat Tepat	100 %	51,105,000	Sesuai
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41,105,000	41,105,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41,105,000	Sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10,000,000	Sesuai
Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	1 Dokumen	0	0	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	1 Dokumen	0	Sesuai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,052,431,168	10,052,431,168	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,052,431,168	Sesuai
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	10,052,431,168	10,052,431,168	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	10,052,431,168	Sesuai

Kesimpulan

No.	P - Renja				Renstra			Keterangan	
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Sasaran	Indikator		
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa				Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten	INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)	84%	Tidak Sesuai (Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target pada P-Renja tidak sama dengan Renstra)
					Terperuhnya kebutuhan penunjang pelaksanaan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Terperuhnya kebutuhan penunjang pelaksanaan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase terperuhnya kebutuhan penunjang pelaksanaan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	

1. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMENPENDUKUNG RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP	No. KKR	: 1
	Disusun	: Nurhasanah, S.Psi
	Direviu oleh/Tanggal	: Elsa Paulina, S.E.,M.Si
	Disetujui	: Emmy Rosmala,S.Pd.,M.Si

Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RENJA

No.	Uraian	Ada	Tidak	
1	Surat Permohonan Permintaan Reviu Perangkat Daerah	√		P-660/300/DLH/2025 Tanggal 20 Juni 2025
2	SK Tim P- Renja	√		Keputusan Kepala Dinas DLH No: B-660/117/SK/DLH-I/2025 Tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
3	Perbup P - RKPD Tahun 2025	√		Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024
4	Rancangan P- Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	√		Keputusan Kepala Dinas DLH No: B-660/130/SK/DLH-I/2025
5	Renstra 2023 -2026 Perangkat Daerah	√		nomor: 026/SK/DLH-SEKRT/2022 Tanggal 20 Januari 2022
6	BA Ratek P - Renja Tahun 2025	√		nomor: B-000.7.1/098/RKPD-2026/IPW/2025 Tanggal 14 Mei 2025

Kesimpulan : Dokumen tidak lengkap (Renstra 2023-2026 perangkat daerah tidak ada)

Langkah kerja:

No.	P-Rentja				P-RKPD				Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			55.218.972.335	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			55.218.972.335	Sesuai
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			55.218.972.335	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			55.218.972.335	Sesuai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENIKOTA	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup	100 %	39.342.676.183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENIKOTA	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup	100 %	39.342.676.183	Sesuai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	63.662.762	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	63.662.762	Sesuai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.494.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.494.000	Sesuai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.696.762	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.696.762	Sesuai
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	32.500.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	32.500.000	Sesuai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	11.792.706.880	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	11.792.706.880	Sesuai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	11.792.706.880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	11.792.706.880	Sesuai
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	99.116.950	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	99.116.950	Sesuai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Attribut Kelengkapan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	90.642.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Attribut Kelengkapan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	90.642.000	Sesuai
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	929.292.574	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	929.292.574	Sesuai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	494.585.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	494.585.900	Sesuai
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	59.992.272	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	59.992.272	Sesuai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	99.998.972	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	99.998.972	Sesuai
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	54.716.561	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	54.716.561	Sesuai
	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Sesuai

Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	50.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	50.000.000	Sesuai
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	99.999.996	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	99.999.996	Sesuai
Pengadaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	60.000.000	Pengadaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	60.000.000	Sesuai
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	60.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	60.000.000	Sesuai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.605.893.152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.605.893.152	Sesuai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	442.467.252	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	442.467.252	Sesuai
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.163.425.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.163.425.900	Sesuai
Pemeliharaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		701.341.865	Pemeliharaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		701.341.865	Sesuai
Penyediaan Jasa Pengamanan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	263.240.000	Penyediaan Jasa Pengamanan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	263.240.000	Sesuai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	266.054.559	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	266.054.559	Sesuai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	172.047.305	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	172.047.305	Sesuai
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100 %	397.795.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100 %	397.795.000	Sesuai
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RDR Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	397.795.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RDR Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	397.795.000	Sesuai
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	397.795.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	397.795.000	Sesuai
Penyusunan Dokumen KLHS RDR	Penyusunan Dokumen KLHS RDR		380.000.000	Penyusunan Dokumen KLHS RDR	Penyusunan Dokumen KLHS RDR		380.000.000	Sesuai
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.117.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.117.000	Sesuai
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.378.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.378.000	Sesuai
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan		8.300.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan		8.300.000	Sesuai
PROGRAM PENGENDALIAN PEMCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	66,29 Indeks	1.060.693.174	PROGRAM PENGENDALIAN PEMCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	66,29 Indeks	1.060.693.174	Sesuai
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	66,29 Indeks	1.047.851.174	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	66,29 Indeks	1.047.851.174	Sesuai
Kordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	62.648.000	Kordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	62.648.000	Sesuai
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	70.938.000	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	70.938.000	Sesuai
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen	49.023.000	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen	49.023.000	Sesuai

PENGADAAN PERALATAN PERTAMAHAN	27.282.000	PENGADAAN PERALATAN PERTAMAHAN			27.282.000	Sesuai
PENGADAAN PERALATAN PERTAMAHAN	24.038.000	PENGADAAN PERALATAN PERTAMAHAN			24.038.000	Sesuai
Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	340.000	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat			340.000	Sesuai
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	127.423.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100 %	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	127.423.000	Sesuai
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	127.423.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	127.423.000	Sesuai
Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	62.369.000	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12 Dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	62.369.000	Sesuai
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.954.300	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	24 Badan Usaha	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	65.954.300	Sesuai
PROGRAM Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	49.711.000	PROGRAM Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			49.711.000	Sesuai
Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	49.711.000	Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			49.711.000	Sesuai
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	49.711.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	49.711.000	Sesuai
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84.114.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			84.114.000	Sesuai
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	84.114.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	84.114.000	Sesuai
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	84.114.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	26 Pengaduan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dianggapi	84.114.000	Sesuai
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.548.614.728	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100 %	Persentase Penanganan sampah	10.548.614.728	Sesuai
Pengelolaan Sampah	10.548.614.728	Pengelolaan Sampah	100 %	Persentase penanganan sampah	10.548.614.728	Sesuai
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50 Kelompok	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0	Sesuai

Lampiran Uraian Hasil Reviu Kesesuaian tujuan, sasaran, indikator dan target dalam P Renja PD dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra PD No Urut 3

No.	P - Renja				Renstra			Keterangan
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program kegiatan berdasarkan realisasi DPA-Petangkat Daerah				Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Memngkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	66,29%
					Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Memngkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan		100%
								TidakSesuai (Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target pada P-Renja tidak sama dengan Renstra)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kol. Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Serasan Jaya, Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321035 / Fax. (0714) 322535

CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN P - RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Disusun oleh/ Tanggal	Nurhasanah, S.Psi 23 Juni 2025
	Direviu oleh/ Tanggal	Elsa Paulina, S.E., M.Si 24 Juni 2025
	Disetujui oleh/ Tanggal	Emmy Rosmala, S.Pd., M.Si 24 Juni 2025

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 706/ST/ITDA/2025 tanggal 19 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dengan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. Kelengkapan dokumen pendukung

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu atas kelengkapan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang disampaikan kepada APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

- Surat Permohonan Reviu Perangkat Daerah;
- SK Tim Penyusun P-Renja Tahun 2025;
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang P-RKPD Tahun 2025;
- Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Renstra Tahun 2023-2026;
- Berita Acara Ratek P-Renja Tahun 2025.

2. Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-Renja dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-RKPD

Kesimpulan

Berdasarkan hasil revidi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu pada Bab III dalam P-Renja telah sesuai dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu dalam P-RKPD (terlampir)

3. Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam P-Renja dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Renstra

Kesimpulan

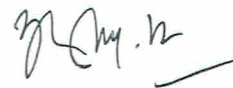
Berdasarkan hasil revidi, Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Perangkat Daerah pada Bab III dalam P-Renja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target pada Bab IV dalam Renstra. (terlampir)

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Banyuasin,

Plt. Oktarizal, S.E
NIP. 19771029 200212 1 007

Sekayu, 25 Juni 2025

Pengendali Teknis,



Emmy Rosmala, S.Pd., M.Si
NIP 19750206 200701 2 003